

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kesehatan dalam jangka panjang di Indonesia dari waktu ke waktu akan semakin kompleks. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.504 pulau yang terdiri dari pulau besar/ kecil serta memiliki posisi yang sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudera serta berada pada jalur lalu lintas perdagangan internasional dengan banyaknya pintu masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini merupakan suatu peluang, tetapi juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan (Depkes, 2009). Hal ini memperbesar risiko masuk dan keluarnya penyakit menular (*new infectious diseases*, *emerging infectious diseases*, dan *re-emerging infectious diseases*), dimana ketika pelaku perjalanan memasuki pintu masuk negara gejala klinis penyakit belum tampak. Disamping kemajuan teknologi di berbagai bidang lainnya yang menyebabkan pergeseran epidemiologi penyakit, ditandai dengan peregerakan kejadian penyakit dari satu benua ke benua lainnya, baik pergerakan secara alamiah maupun pergerakan melalui komoditas barang di era perdagangan bebas dunia yang dapat menyebabkan peningkatan faktor risiko (Depkes, 2009).

Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal PP dan PL mengemban tugas pokok dan fungsi dalam mencegah masuknya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, dituntut mampu menangkai risiko kesehatan yang mungkin masuk dari negara lain dengan melakukan tindakan tanpa menghambat perjalanan dan perdagangan (Depkes 2007). Dalam melaksanakan tugas tersebut, salah satu kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang adalah menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan *hygiene* sanitasi kapal laut, karena kapal termasuk salah satu faktor risiko yang dapat menjadi sumber penularan penyakit menular atau kontaminasi termasuk vektor dan reservoir.

Berdasarkan hasil survei awal terhadap laporan tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2014-2016 selama 3 tahun berturut-turut jumlah kedatangan kapal laut dari luar negeri ke KKP Kelas II Padang relatif

meningkat setiap tahunnya dan jumlah kedatangan kapal dari luar negeri negara terjangkit penyakit karantina dan potensial wabah selalu meningkat setiap tahunnya dimana tahun 2014 terdapat 16,5% kedatangan kapal laut dari luar negeri terjangkit dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 24,3% kemudian pada tahun 2016 maningkat lagi menjadi 42,5% dari jumlah kedatangan kapal laut dari luar negeri.

Sedangkan jumlah dan jenis kedatangan kapal dari negara terjangkit juga terjadi peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2014 sebanyak 6 negara terjangkit dari 20 negara, tahun 2015 meningkat menjadi 9 negara terjangkit dari 23 negara dan pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan sebanyak 12 negara terjangkit dari 25 negara asal kedatangan kapal laut dari luar negeri. Artinya bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terjadi peningkatan masuknya faktor risiko penyakit menular potensial wabah antara lain seperti ; *Mers-CoV, Yellow Fever, Cholera, Avian Influenza, Virus Zika, Meningitis, Ebola, Polio, H5N1 dan H7N9* yang berpotensi masuk ke wilayah negara Indonesia melalui *point of entry* salah satunya pelabuhan laut (KKP, 2016).

Saat ini Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang memiliki sumber daya manusia sebanyak 81 orang, namun jumlah tenaga yang terlibat langsung dalam program pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri ini yaitu sebanyak 23 orang dengan penyebaran di kantor induk sebanyak 17 orang, wilker Bungus sebanyak 3 orang dan wilker Sikakap sebanyak 3 orang. Dari 23 orang petugas tersebut hanya sebanyak 5 orang (21,7%) yang mempunyai jabatan fungsional tertentu yaitu epidemiolog sebanyak 1 orang, sanitarian sebanyak 2 orang dan perawat sebanyak 2 orang sedangkan 18 orang (78,3%) lainnya fungsional umum dan struktural (KKP, 2016). Secara umum sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan SOP berupa menduduki jabatan fungsional tertentu masih sedikit yaitu sebanyak 13 orang (22,8%) dari 57 orang dan yang telah mengikuti diklat kekarantina kapal sebanyak 12 orang (21%) serta yang mempunyai kemampuan berbahasa asing sebanyak 8 orang (14%).

Selain sumber daya manusia juga ketersediaan sarana dan prasarana masih kurang diantaranya masih kurangnya peralatan *boarding (boarding kit)* termasuk alat pelindung diri (*protective personal equipment*) yang mana pada kantor induk

ketersediaan sarana dan prasarana telah mencapai 95% sedangkan di wilayah kerja Bungus, Muara dan Sikakap masih < 50%. Hal ini dikarenakan pengalokasian dana untuk pengadaan sarana dan prasarana kegiatan ini sedikit sekali karena tidak dilakukan inventarisasi terlebih dahulu terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang ada sehingga kekurangan masih tetap terjadi terutama sarana dan peralatan penunjang kegiatan pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri di wilayah kerja Bungus dan Sikakap.

Salah satu kebijakan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kapal laut dari luar negeri yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1962 tentang karantina laut yang mana sampai saat ini masih digunakan dan belum ada penggantinya pada pasal 1 disebutkan bahwa penyakit karantina itu adalah pes, kholera, demam kuning, tifus bercak wabahi dan demam bolak balik, sementara itu perkembangan penyakit saat ini begitu pesatnya seperti *yellow fever*, *cholera*, *MERS-CoV*, SARS, Ebola, Virus Zika, *polio*, H7N9, H5N1, H5N6 dan sebagainya sehingga undang-undang ini tidak relevan lagi baik dari segi penatalaksanaan kasus penyakitnya maupun dalam penegakkan sanksi terhadap pelanggarannya. Dalam beberapa kasus pelanggaran terhadap undang-undang ini yang pernah terjadi tidak diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengingat lemahnya sanksi hukum yang terdapat pada pasal 42 undang-undang ini sehingga pelanggaran hanya sebatas membuat surat pernyataan tanpa ada sanksi pidana.

Dari beberapa permasalahan di atas secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap pelaksanaan program pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marwansyah (2010) menyebutkan bahwa sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap terlaksananya kegiatan organisasi. Daya saing organisasi ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Simanjuntak (2005) yang mengatakan bahwa sumber daya manusia yang terlatih dan mendapat dukungan fasilitas dan lingkungan, merupakan salah satu modal penting untuk mewujudkan pengendalian penyakit yang berpotensi wabah dengan efektif. Keterbatasan sumber daya baik dari segi kuantitas maupun kualitas akan berpengaruh terhadap

pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan atau yang disebut dengan kinerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Program Pengawasan Kedatangan Kapal Laut dari Luar Negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2017”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pelaksanaan Program Pengawasan Kedatangan Kapal Laut dari Luar Negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2017”

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui *input* (kebijakan, SOP, tenaga, metode, dana dan sarana) dalam pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2017.
- b. Mengetahui proses (perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, kepatuhan petugas, kerjasama lintas sektor, monitoring dan evaluasi) dalam pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2017.
- c. Mengetahui *output* (terlaksananya program pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri sesuai SOP) di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis/ Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang karantina kesehatan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang dalam penentuan arah kebijakan pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman belajar dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan menambah wawasan pengetahuan.

